

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran kondisi dan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas keuangan yang digunakan. Penyusunan LKPD memiliki tujuan yakni salah satunya adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi kepala daerah dan DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal suatu pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, LKPD diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diauditnya LKPD oleh BPK bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai apakah LKPD telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, LKPD harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat daerah sebelum LKPD tersebut diserahkan ke BPK untuk diaudit. Proses reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan tersebut bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan agar laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berlaku dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Mengingat pentingnya pelaksanaan reviu atas LKPD, maka penulis tertarik untuk meninjau proses reviu LKPD Provinsi Jawa Barat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam proses reviu tersebut. Dikarenakan topik tersebut penting, maka penulis memilih judul untuk karya tulis “TINJAUAN PROSES REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT OLEH INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur reviu laporan keuangan daerah yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja pedoman atau peraturan terkait dengan reviu atas laporan keuangan daerah yang diterapkan oleh Inspektorat?
3. Apakah prosedur reviu yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melakukan reviu LKPD Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

2. Mengetahui pedoman atau peraturan yang digunakan dalam melakukan reviu oleh Inspektorat.
3. Mengetahui prosedur reviu yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melakukan reviu LKPD Provinsi Jawa Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis berfokus pada kesesuaian atas prosedur reviu LKPD dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan PMK Nomor 8/PMK 9/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penulis sadar dengan keterbatasan dalam pengambilan data dan faktor-faktor lainnya, maka dari itu penulis membatasi masalah yang dibahas yakni prosedur reviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, pedoman yang digunakan dalam melakukan reviu yang diterapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, membandingkan kesesuaian antara prosedur reviu LKPD oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan peraturan yang berlaku dan penyebab yang menimbulkan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Berikut adalah manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini:

1. Bagi Umum, memberikan pengetahuan bagaimana proses reviu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Penulis, dapat menjadi alat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang prosedur rewiu LKPD.
3. Untuk Inspektorat, dapat menjadi saran untuk tim rewiu agar prosedur rewiu yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah mengenai topik yang dibahas, rumusan masalah yang menjadi topik untuk diuraikan penulis, tujuan penulisan dalam menyusun karya tulis ini, ruang lingkup penulisan yang menjelaskan batasan-batasan yang penulis ambil agar masalah tidak melebar, manfaat penulisan dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjelaskan kajian teoritis yang digunakan penulis yakni gambaran umum Inspektorat Provinsi Jawa Barat seperti visi dan misi, struktur organisasi, serta profil singkat, kemudian profil singkat mengenai Provinsi Jawa Barat, teori apa saja yang melandasi karya tulis ilmiah penulis seperti pengertian proses rewiu, hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan rewiu serta hal-hal yang menjadi penghambat kegiatan rewiu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian penulis terkait tinjauan proses rewiu atas laporan keuangan Provinsi Jawa Barat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Penulis menguraikan tentang proses rewiu yang sesuai antara yang dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2018 dan PMK Nomor 8/PMK 9/2015. Selain itu, penulis menguraikan faktor penghambat dalam melakukan revidi laporan keuangan Provinsi Jawa Barat.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi uraian simpulan dari hasil evaluasi dan pembahasan bab sebelumnya. Kemudian penulis memberikan saran kepada objek penelitian terkait penyelesaian masalah pada Tinjauan Proses Revidi Atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.